



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT

LAKIP

**LAPORAN
AKUNTABILITAS
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH**

2023

**BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**





KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta Tahun 2023 sebagai pertanggungjawaban Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta melalui pembiayaan APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023.

Laporan Kinerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta Tahun 2023 ini dimaksudkan sebagai media pertanggungjawaban secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat dalam mencapai misi dan tujuan dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik (Good Governance). Laporan ini juga menggambarkan tingkat pencapaian kinerja, keberhasilan dan atau kegagalan didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan visi dan misi Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta.

Yang menjadi acuan penyusunan Laporan Kinerja ini adalah :

1. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ;
2. Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas LAKIP ;
3. Peraturan Gubernur Nomor 852 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.



4. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 48 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat.

Perpres RI Nomor 29 Tahun 2014 tersebut dimaksudkan sebagai wujud pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate. Dengan adanya Perpres ini pemerintah telah menerapkan suatu system pertanggungjawaban yang berfokus pada kinerja dan secara terpadu mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, visi serta misi organisasi.

Dengan berakhirnya pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 berarti Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta telah menyelesaikan kegiatannya dari Rencana Strategis yang telah digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat dalam upaya memenuhi visi dan misinya.

Selama Tahun 2023, sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan didalam Renstra telah berhasil dicapai. Capaian Kinerja tersebut dituangkan kedalam Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023, sebagai bentuk pertanggungjawaban prinsip - prinsip transparansi dan akuntabilitas, penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja kami kepada para stakeholders.

Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari atasan yang berharga dan bermanfaat atas penilaian Laporan Kinerja sangatlah kami harapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan di masa yang akan datang. Akhirnya, kami berharap Laporan Kinerja ini dapat memberikan kontribusi yang berharga dan



bermanfaat untuk peningkatan kinerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta guna mewujudkan "Good Governance" di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara Aamiin.

Jakarta, Februari 2024

KEPALA BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



ABDUL GANI, SH
Pemina
NIP. 197208211997031006



DAFTAR ISI

	hal
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN	5
A. URAIAN SINGKAT ORGANISASI	5
1. PENDAHULUAN	5
2. SUSUNAN ORGANISASI	6
3. TUPOKSI	6
4. SUMBER DAYA APARATUR (SDA)	12
5. SUMBER DAYA KEUANGAN	14
6. SARANA DAN PRASARANA	14
B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	21
A. RENSTRA	21
1. VISI	22
2. MISI	22
3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BESERTA INDIKATOR KINERJA UTAMA	25
B. PERJANJIAN KINERJA.....	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	31
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	31
B. REALISASI ANGGARAN	45
BAB IV PENUTUP	48
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA	50



BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. PENDAHULUAN

Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat yang berkedudukan di Jalan Salak Nomor 32 Kelurahan Guntur Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, yang terbentuk berdasarkan :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
- c. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7) ;
- d. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat ;
- e. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 101 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat.

Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan



Barat telah berperan aktif dalam rangka pelaksanaan / penyelenggaraan urusan Pemerintahan sesuai tugas pokok dan fungsinya , oleh karena itu pada tiap akhir tahun anggaran akan menyampaikan pertanggungjawaban administrasi dalam bentuk penyampaian Laporan Kinerja Tahunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Laporan Kinerja Tahunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 ini diharapkan mampu untuk menggambarkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama Tahun Anggaran 2023 (1 Januari s.d 31 Desember 2023).

2. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari:

1. Kepala Badan
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga
4. Sub Bidang Promosi Daerah
5. Sub Bidang Pelayanan
6. Kelompok Jabatan fungsional

Bagian - bagian tersebut masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.

3. TUPOKSI

Sebagaimana diketahui bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 adalah tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, maka berdasarkan Peraturan Daerah tersebut ditetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 101 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat.



Dengan dasar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat dimaksud, maka Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat mempunyai **tugas :**

Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis kegiatan penghubung antar Pemerintah Provinsi dengan instansi pemerintah/lembaga-lembaga di Jakarta, mewakili pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mengikuti rapat yang tidak bersifat teknis di Jakarta, fasilitasi dan pendayagunaan asrama mahasiswa dan aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta dan daerah lainnya, penunjang kegiatan promosi, pengelolaan anjungan daerah, pemberian pelayanan penunjang kegiatan protokoler serta melaksanakan tugas lainnya yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan lingkup tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas, Badan Penghubung menyelenggarakan

fungsi:

- a. Perumusan program kerja di bidang penghubung;
- b. Perumusan kebijakan dibidang penghubung;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang penghubung;
- d. Pengkoordinasian di bidang penghubung;
- e. Penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang penghubung sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang penghubung;
- g. Pelaksanaan administrasi Badan Penghubung;
- h. Penghubung antara Pemerintah Provinsi dengan lembaga – lembaga lainnya di Jakarta dan daerah lainnya;
- i. Pelayanan terhadap kepentingan Pemerintah Provinsi di Jakarta dan daerah lainnya;
- j. Pembinaan masyarakat, mahasiswa Kalimantan Barat di Jakarta dan daerah lainnya;
- k. Pengelolaan aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta dan daerah lainnya;



- l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan asrama mahasiswa dan aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta dan lainnya;
- m. Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di Lingkungan Badan Penghubung;
- n. Pengelolaan anjungan daerah Provinsi Kalimantan Barat Taman Mini Indonesia di Jakarta dan daerah lainnya;
- o. Penunjang koordinasi pelaksanaan kegiatan promosi daerah yang dilaksanakan oleh unit kerja Provinsi, Kabupaten / Kota meliputi sosial, budaya, ekonomi, dan pariwisata berdasarkan kebijakan Gubernur;
- p. Pelayanan penunjang kegiatan protokoler dan perjalanan dinas bagi pejabat eksekutif dan legislatif Provinsi dan Kabupaten / Kota se Kalimantan Barat di Jakarta dan daerah lainnya;
- q. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang penghubung sesuai peraturan perundang-undangan;

KEPALA BADAN MEMPUNYAI TUGAS :

Memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan badan di bidang penghubung sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas, **Kepala Badan mempunyai fungsi :**

- a. Penetapan program dan kegiatan di bidang hubungan antar lembaga, promosi daerah serta pelayanan.
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang hubungan antar lembaga, promosi daerah serta pelayanan.
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang penghubung daerah;
- d. Pembinaan dan pengarahan kegiatan di bidang hubungan antar lembaga, promosi daerah serta pelayanan.
- e. Penyelenggaraan kegiatan di bidang penghubung sesuai peraturan perundang - undangan;



- f. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang hubungan antar lembaga promosi daerah serta pelayanan;
- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Badan Penghubung;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang penghubung daerah;
- j. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang penghubung daerah yang diberikan oleh Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan;

SUB BAGIAN TATA USAHA mempunyai tugas : menyusun rencana kerja, administrasi kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan keuangan, aset dan administrasi umum.

Untuk melaksanakan tugas, **Sub Bag Tata Usaha mempunyai fungsi:**

- a. Penyusunan dan penyesuaian program kerja Badan serta tata usaha keuangan, aset, aparatur, dan administrasi umum;
- b. Pelaksanaan tata usaha keuangan;
- c. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai, organisasi dan tatalaksana Badan, penyiapan bahan laporan tindak lanjut pengawasan;
- d. Pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan serta urusan umum lainnya, hukum dan kehumasan;
- e. Pelaksanaan pengadaan, penyaluran, penyimpanan serta pemeliharaan peralatan dan aset serta rumah tangga Badan;
- f. Pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Badan Penghubung;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kerja Badan



- h. Pelaksanaan tugas lain di bidang tata usaha yang diserahkan oleh Kepala Badan;

SUB BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA mempunyai tugas : mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis melaksanakan fasilitasi hubungan antara Pemerintah Provinsi dengan lembaga-lembaga Pemerintah dan lembaga masyarakat serta swasta lainnya di Jakarta dan daerah lainnya, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas, **Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga** mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan di Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga;
- b. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang hubungan antar lembaga;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang hubungan antar lembaga di Jakarta dan daerah lainnya;
- d. Pelaksanaan hubungan dengan instansi pemerintah pusat, instansi terkait lainnya di Jakarta dan daerah lainnya;
- e. Pengelolaan sarana dan prasarana hubungan antar lembaga;
- f. Penyediaan sarana dan prasarana untuk memperlancar pelaksanaan tugas eksekutif dan legislatif pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota di Jakarta dan daerah lainnya;
- g. Pengkoordinasian dan pengendalian kegiatan di bidang hubungan antar lembaga;
- h. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang hubungan antar lembaga;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang hubungan antar lembaga;
- j. Pelaksanaan tugas lain di bidang hubungan antar lembaga yang diserahkan oleh Kepala Badan.

SUB BIDANG PROMOSI DAERAH mempunyai tugas-tugas antara lain : mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang promosi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota se Kalimantan



Barat dan daerah lainnya, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas, **Sub Bidang Promosi Daerah** mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja di Sub Bidang Promosi Daerah;
- b. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang pengembanagan promosi daerah ;
- c. Penyiapan bahan-bahan promosi daerah;
- d. Pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data dan informasi sebagai bahan promosi daerah di Jakarta dan daerah lainnya;
- e. Memfasilitasi kegiatan promosi daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta;
- f. Pengelolaan sarana dan prasarana promosi melalui media elektronik dan non elektronik;
- g. Pengkoordinasikan dan pengendalian kegiatan di bidang promosi daerah;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang promosi daerah;
- i. Pelaksanaan tugas lain di bidang promosi daerah yang diserahkan oleh Kepala Kantor.

SUB BIDANG PELAYANAN mempunyai tugas melakukan urusan protokoler dan perjalanan dinas terhadap pejabat eksekutif, legislatif Provinsi dan Kabupaten / Kota serta memfasilitasi pendayagunaan mess daerah dan asrama mahasiswa Kalimantan Barat di Jakarta dan daerah lainnya Untuk melaksanakan tugas, **Sub Bidang Pelayanan** mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di Sub Bidang Pelayanan;
- b. Pelaksanaan pelayanan penunjang kegiatan protokoler dan perjalanan dinas bagi pejabat eksekutif dan legislatif Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat di Jakarta dan daerah lainnya;
- c. Penyediaan sarana dan prasarana untuk memperlancar pelaksanaan tugas eksekutif dan legislatif pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta dan daerah lainnya;



- d. Pembinaan masyarakat dan mahasiswa Kalimantan Barat di Jakarta dan daerah lainnya;
- e. Pengelolaan Mess Daerah dan Asrama Mahasiswa Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta dan daerah lainnya;
- f. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- g. Penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di bidang pelayanan;
- h. Pelaksanaan tugas lain di bidang pelayanan yang diserahkan oleh Kepala Badan;

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah PNS dalam jenjang Jabatan Fungsional berdasarkan bidang keahlian dan ketrampilan tertentu. Pegawai Jabatan Fungsional ini dijabat oleh pegawai fungsional yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan .

Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan kebutuhan melalui analisis jabatan.

4. SUMBER DAYA APARATUR

Sumber daya aparatur yang bertugas pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta per 31 Desember 2023 sebanyak 26 orang yang dapat diklasifikasikan berdasarkan pangkat / golongan, jabatan dan pendidikan sebagai berikut :

**TABEL 1
KOMPOSISI PNS BERDASARKAN KEPANGKATAN**

NO.	URAIAN	POSISI PER 31 DESEMBER 2023
1	2	3
1.	Golongan IV /b	-
2	Golongan IV /a	2 Orang
3.	Golongan III/d	2 Orang
4.	Golongan III/c	3 Orang
5.	Golongan III/b	7 Orang
6.	Golongan III/a	5 Orang



7.	Golongan II/d	-
8.	Golongan II/c	-
9.	Golongan II/b	5 orang
10.	Golongan II/a	2 orang
11.	Golongan I/d	-
JUMLAH		26 Orang

**TABEL 2
KOMPOSISI PNS BERDASARKAN ESELON**

NO.	URAIAN	POSISI PER 31 DESEMBER 2023
1.	Pejabat Struktural Eselon III Eselon IV	1 orang 4 orang
2.	Staf	22 orang
JUMLAH		26 orang

**TABEL 3
KOMPOSISI PNS BERDASARKAN PENDIDIKAN**

NO	URAIAN	POSISI PER 31 DESEMBER 2023
1	2	3
1.	S3	1 Orang
2.	S2	1 orang
3.	S1	9 orang
4.	D4	-
5.	Sarmud / D3	6 orang



6.	SLTA	8 orang
7.	SLTP	1 orang
8.	SD	-
	JUMLAH	26 Orang

4. SUMBER DAYA KEUANGAN

TABEL 4
SUMBER DAYA KEUANGAN (APBD TA.2023)

NO	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN
1.	5.07.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	5.521.945.655,00
2.	5.07.02	Program Pelayanan Penghubung	1.364.140.293,00
TOTAL			6.886.085.948,00

6. SARANA DAN PRASARANA

TABEL 5
SARANA DAN PRASARANA

NO	JENIS SARANA/PRASARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Gedung Kantor + Mess		
	- Gedung Kantor	1	Ruang Kepala Kantor
		1	Ruang Rapat



	- Mess	1 1 1 3 2 8 1	Ruang Kerja Ruang Tamu Garasi Kamar VIP A (Kapasitas 2 Org) Kamar VIP B (Kapasitas 2 Org) Kamar VIP C (Kapasitas 4 Org) Kamar Standar (Kapasitas 6 Orang)
2.	Bangunan Asrama	12	Tersebar di 7 Kota di Pulau Jawa : Jakarta, Bogor, Bandung, Semarang, Solo, Yogya, Malang.
3.	Bangunan Khusus	1	Anjungan Daerah Kalimantan Barat Taman Mini Indonesia Indah
4.	Kendaraan Roda Empat	5	Mobil Operasional (Penunjang kegiatan Gubernur/Wakil Gubernur, Sekda dan Ketua DPRD Provinsi saat di Jakarta)

B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Pada dasarnya Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2023 tidak ada permasalahan yang menghambat jalannya program maupun kegiatan yang telah direncanakan. Hal ini dapat dilihat dengan berjalannya program-program serta kegiatan - kegiatan yang tercantum dalam DPA. Namun secara praktek di lapangan ada sedikit permasalahan yang dihadapi seperti :

1. SUBBAG TATA USAHA.

Kompetensi Pegawai Negeri Sipil pada Badan Penghubung dirasa belum memenuhi standar tuntutan beban kerja yang ada, sedangkan anggaran bimbingan teknis dan pelatihan tidak mencukupi, karena dialokasikan ke program dan kegiatan lain. Selanjutnya anggaran untuk melaksanakan koordinasi juga tidak mencukupi dengan jumlah rapat – rapat yang perlu diikuti Badan Penghubung di Pontianak, sehingga Badan Penghubung tidak



bisa mengikuti kegiatan rapat, dan fasilitas rapat melalui daring tidak disiapkan.

SOLUSINYA :

Anggaran untuk melaksanakan kegiatan koordinasi ditambah supaya dapat menghadiri kegiatan – kegiatan sebagaimana surat undangan yang ditujukan kepada Badan Penghubung. Dan penyediaan fasilitas zoom meeting untuk mengikuti kegiatan rapat melalui daring.

2. SUB BIDANG PELAYANAN.

Kegiatan pengelolaan mess daerah dan kegiatan protokoler merupakan kegiatan yang tidak dapat ditunda-tunda mengingat tamu yang datang muntuk menginap di mess Banhub serta Pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas ke Jakarta dan daerah lainnya bisa mendadak dan tidak dapat dipastikan waktunya, sementara alokasi dana APBD akan terealisasi sekitar bulan Maret tahun berjalan.

Selain itu berkurangnya anggaran belanja kegiatan di Bidang Pelayanan Penghubung terutama :

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat untuk penyediaan Operasional Pengelolaan Mess sehingga menyebabkan dari sisi kebersihan dan kenyamanan para tamu mess dan pejabat yang dilayani tidak terpenuhi dengan maksimal dan sesuai standar.
- b. serta Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung untuk Pengelolaan Protokoler sehingga menyebabkan perjalanan dinas pejabat yang dilayani tidak terpenuhi dengan maksimal dan sesuai standar.



Hal tersebut merupakan kendala atau hambatan yang menjadi **permasalahan utama** bagi Sub Bidang Pelayanan yang perlu mendapatkan solusinya yaitu penambahan anggaran pada kegiatan dimaksud.

Selain itu permasalahan lain yang perlu di sikapi dan perlu mendapatkan perhatian Khusus adalah SDM pada Sub Bidang Pelayanan adalah :

- a. Kurangnya SDM di bidang Protokoler untuk tenaga Lapangan di Bandara dalam rangka pelayanan protokoler perjalanan dinas terhadap Gubernur/Wakil dan para pejabat eksekutif maupun legislatif Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta.
- b. Kurangnya SDM di bidang tenaga resepsionis, dalam rangka pelayanan terhadap para tamu Mess.

SOLUSINYA :

- a. Adanya dana talangan yang tersedia pada triwulan I untuk menyelenggarakan kegiatan Pengelolaan Mess Daerah dan kegiatan Pengelolaan Protokoler dan Perjalanan Kepala Daerah / Wakil dan Pejabat Daerah, sehingga tidak menghambat terselenggaranya fasilitasi pelayanan protokoler perjalanan dinas Pejabat.
- b. Perlu adanya Pelatihan untuk meningkatkan keterampilan/ keahlian SDM dibidang Protokoler untuk tenaga lapangan dalam rangka pelayanan terhadap para Pejabat Eksekutif maupun Legislatif Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta.
- c. Perlu adanya pelatihan guna meningkatkan keterampilan/keahlian bagi SDM di Bidang Tenaga resepsionis, dalam rangka pelayanan terhadap tamu mess.
- d. Perlu disiapkan tenaga penjaga asrama di masing-masing asrama mahasiswa Kalimantan Barat se Jawa.
- c. Perlunya tambahan anggaran pada Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat untuk penyediaan Operasional Pengelolaan Mess



- e. Perlunya tambahan anggaran sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung untuk Pengelolaan Protokoler.

3. SUB BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA.

Kegiatan fasilitasi kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat dan serta Pejabat lainnya merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga. Pada tahun 2023 sudah dilaksanakan 29 kali kegiatan ke Jakarta, Bandung dan Sumatra Utara.

Permasalahan yang terjadi di Tahun 2023 pada Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga yaitu apabila Kegiatan fasilitasi kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat dan serta Pejabat lainnya terjadi diawal tahun (Triwulan I) maka harus menyiapkan uang muka kerja untuk melaksanakan kegiatan dimaksud. Ini menjadi **permasalahan utama** bagi Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga.

Permasalahan selanjutnya adalah ketersediaan anggaran fasilitasi pejabat Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang tidak cukup hingga Triwulan IV sehingga membuat fasilitasi pejabat daerah Provinsi Kalimantan Barat di Luar Provinsi Kalimantan Barat, khususnya di Pulau Jawa menjadi tidak optimal.

Permasalahan selanjutnya adalah kurangnya pegawai sub bidang hubungan antar lembaga. dimana pada tahun 2023 staf di sub bidang Hubungan antar lembaga hanya berjumlah dua orang yang seharusnya berjumlah 4 orang sesuai dengan Dokumen Analisis Jabatan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023

SOLUSINYA :

1. Menambah anggaran Kegiatan fasilitasi kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat dan serta Pejabat lainnya.



2. Menambah jumlah pegawai pada sub bidang Hubungan Antar Lembaga sesuai kebutuhan pada dokumen Analisis Jabatan dan sesuai dengan kompetensi

4. SUB BIDANG PROMOSI DAERAH

PERMASALAHAN

- a. Anjungan Kalimantan Barat TMII setelah di renovasi Tahun 2022 terdapat 2 maket Perahu Tradisional Bandong dan Rumah Lanting yang dihilangkan, sebelumnya maket tersebut terletak di kolam depan bangunan Istana Kadriah. Perahu tradisional Bandong dan Rumah Lanting menjadi favorit untuk diceritakan kepada Pengunjung sebagai alat transportasi dan Rumah Lanting yang terapung di pinggir Sungai Kapuas.
- b. Belum tersedianya 7 logo Pemerintah Kabupaten hasil pemekaran dan perubahan antara lain Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Bengkayang, Landak, Melawi, Sekadau, Mempawah, dan Kabupaten Kayong Utara.
- c. Tidak tersedianya dana anggaran untuk kegiatan piket hari – hari libur, sehingga pemberian informasi kepada pengunjung yang datang ke Anjungan Kalimantan Barat tidak terlayani dengan baik.
- d. Belum tersedianya kendaraan dinas berbahan Listrik, sehingga menyulitkan pegawai dan tamu ke Anjungan Kalimantan Barat karena TMII dengan wajah baru yang hanya memperbolehkan kendaraan Listrik sebagai alat transportasi ke Anjungan Daerah.
- e. Untuk tahun anggaran 2023 telah dilaksanakan pagelaran kesenian dan kebudayaan di Anjungan Kalimantan Barat sebanyak 2 kali yaitu bulan Februari dan bulan Juni, dengan kondisi ini promosi budaya dan wisata



sangat kurang, sedangkan promosi budaya dan wisata di TMII dari Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat, maupun dari Pemerintah Kabupaten dan Kota belum terlaksana.

SOLUSINYA :

- a. Mengusulkan pengadaan Kembali maket perahu tradisional Bandong dan Rumah Lanting sebagai ikon khas Kalimantan Barat.
- b. Mengusulkan pengadaan 7 logo Pemerintah Kabupaten yang terbuat dari kayu, karena logo yang sudah ada terbuat dari kayu.
- c. Untuk pengadaan kendaraan dinas Listrik dan anggaran dana untuk kegiatan piket pegawai pada hari libur telah diusulkan kepada Kepala Badan Penghubung tahun 2023.
- d. Untuk kegiatan pegelaran kesenian dan kebudayaan di TMII berupaya dengan menggandeng penggiat seni dan budaya Kalimantan Barat yang ada di Jakarta, koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota se Kalimantan Barat tentang kegiatan seni dan budaya di TMII sebagai ajang pariwisata dan pengenalan produk unggulan UMKM kepada Masyarakat luas.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENSTRA BADAN PENGHUBUNG

Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 - 2026 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat dan berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat merupakan perwujudan dari visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat.

1. VISI BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Visi berkaitan dengan pandangan jauh ke depan menyangkut ke mana instansi Pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Dengan demikian visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.

Dalam konteks ini untuk tercapainya peningkatan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat, maka telah ditetapkan visi dan misi yang mengacu pada visi dan misi Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2023 yaitu ” *Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan* ”.

Adapun Visi Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat adalah

”Menjadikan Badan Penghubung sebagai Duta Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta dan Sekitarnya”



Yaitu sebagai Duta Pemerintah Provinsi dalam rangka Peningkatan Hubungan Antar Lembaga yang loyal akan menambah keharmonisan dalam berhubungan di sektor birokrasi pemerintahan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah - daerah lainnya dalam penyampaian informasi-informasi tentang Pemerintahan yang diperlukan untuk kepentingan kemajuan pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat khususnya.

Peningkatan pembinaan kepada masyarakat dan mahasiswa asal Kalimantan Barat yang sedang belajar di Pulau Jawa akan termonitoring dan terkoordinir dengan baik, aspirasi maupun kritik-kritik yang membangun, sehingga terjadi komunikasi yang baik antara Pemerintah Daerah dengan warganya.

Di bidang promosi daerah mengenai perkembangan kemajuan dari pariwisata, sosial budaya Kalimantan Barat pada umumnya dapat dijabarkan melalui media pameran - pameran dan pagelaran - pagelaran yang diikuti oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang diadakan oleh Institusi Pemerintah, swasta maupun lembaga-lembaga masyarakat di Jakarta.

2. MISI BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Misi adalah suatu gambaran yang harus dilaksanakan agar tujuan yang diinginkan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang ditetapkan. Adapun yang menjadi misi Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat adalah :

- a. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Badan Penghubung dalam rangka memberikan pelayanan kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota se Kalimantan Barat.
- b. Menjalin hubungan kerjasama dan koordinasi dengan mitra kerja atau stakeholders di Jakarta dan daerah lainnya.
- c. Mewujudkan pelayanan administrasi untuk kelancaran hubungan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat sereta hubungan dengan Masyarakat Kalimantan Barat di Jakarta.
- d. Meningkatkan kegiatan keprotokolan dan promosi daerah Provinsi Kalimantan Barat melalui pemanfaatan sumber daya yang ada.



- e. Mewujudkan pelayanan yang prima terhadap tamu Mess Daerah.
- f. Memberdayakan asrama Mahasiswa Kalimantan Barat di Jakarta dan Daerah lainnya.

Rencana Strategis dan arah kebijakan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan pada ke 6 Misi yang akan dicapai yang tertuang dalam strategi atau kebijakan yang akan dijalankan sebagai berikut :

- a. Misi Meningkatkan kapasitas kelembagaan Badan Penghubung dalam rangka memberikan pelayanan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat.

Strategi :

Meningkatkan karier Sumber Daya Aparatur yang berkaitan dengan Hubungan Antar Lembaga

Kebijakan :

Mengikutsertakan Sumber Daya Aparatur dalam kegiatan Pendidikan dan Latihan (Diklat), Pelatihan-pelatihan teknis guna meningkatkan kemampuan, keterampilan dan keahlian yang diperlukan untuk Pembangunan.

- b. Misi Menjalinkan hubungan kerjasama dan koordinasi dengan mitra kerja atau stakeholder di Jakarta dan Daerah lainnya.

Strategi :

Memperluas jaringan kerjasama dengan mitra kerjasama dengan pihak / lembaga terkait untuk kepentingan pembangunan.

Kebijakan :

Mengembangkan kebijakan teknis kegiatan Badan Penghubung yang berkaitan dengan Lembaga-lembaga Pemerintah, masyarakat serta swasta di Jakarta dan daerah lainnya.



- c. Misi Mewujudkan Pelayanan Administrasi untuk kelancaran hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan hubungan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat Kalimantan Barat.

Strategi :

1. Penugasan personil dilapangan untuk melakukan koordinasi terhadap kepentingan Pemerintah provinsi Kalimantan Barat di Jakarta.
2. Memfasilitasi pertemuan antara Gubernur serta pejabat eksekutif dan legislatif lainnya dengan lembaga-lembaga pemerintah, masyarakat, swasta di Jakarta dan daerah lainnya.

Kebijakan :

1. Memberikan pengarahan dan petunjuk kepada personil terhadap tugas yang diberikan untuk kelancaran pelayanan administrasi.
2. Memberdayakan organisasi kerukunan keluarga Kalimantan Barat (K3B) dan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Kalimantan Barat (KPMKB).
 - a. Misi Meningkatkan kegiatan keprotokolan dan promosi daerah Provinsi Kalimantan Barat melalui pemanfaatan sumber daya yang ada.

Strategi :

Mendukung sarana transportasi untuk kegiatan keprotokolan dan promosi

Kebijakan :

Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mengikuti diklat keprotokolan dan mengikuti perkembangan promosi daerah.

- b. Misi Mewujudkan pelayanan yang prima terhadap tamu Mess Daerah



Strategi :

Mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana untuk keperluan Mess.

Kebijakan :

Disesuaikan dengan Peraturan Gubernur tentang pengelolaan Mess Daerah.

- c. Misi Memberdayakan asrama mahasiswa Kalimantan Barat di Jakarta dan daerah lainnya.

Strategi :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan asrama mahasiswa Kalimantan Barat di Jakarta dan daerah lainnya.
2. Mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana bagi kegiatan keagamaan, seni dan budaya serta olahraga.

Kebijakan :

1. Pembinaan terhadap pengelolaan asrama mahasiswa Kalimantan Barat di Jakarta dan daerah lainnya.
2. Menjadikan asrama mahasiswa sebagai pusat kegiatan yang positif dan bermanfaat dengan melalui kegiatan keagamaan, seni dan budaya serta olahraga

3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BESERTA INDIKATOR KINERJA UTAMA

Tujuan dan sasaran strategis beserta indikator kinerja utama Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat dalam Laporan Kinerja Tahunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2023 mengarah pada program core bisnis yang dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Terlaksananya Pelayanan dan Koordinasi Kelembagaan yang baik terhadap Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat.



2. Terlaksananya Layanan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta.

Adapun sasaran strategis beserta indikator utamanya dapat dilihat dalam tabel berikut

TABEL 1
SASARAN STRATEGIS BESERTA INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya Pelayanan dan Koordinasi kelembagaan yang baik terhadap Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta	Persentase sistem pelayanan dan Koordinasi kelembagaan yang baik terhadap pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat	100%
2.	Terlaksananya layanan penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta	Persentase Kegiatan Kegiatan Layanan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp. 5.521.945.655,00	APBD
2.	Pelayanan Penghubung	Rp. 1.364.140.293,00	APBD
	TOTAL	Rp. 6.886.085.948	APBD

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat program core bisnis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut :



a. Program Peningkatan Partisipasi dan Kemitraan Antar Sektor dan Pemerintah Daerah

Hubungan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Kementerian-Kementerian di Jakarta dan Instansi Vertikal berjalan dengan baik.

b. Program Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Pemerintah Daerah.

Program ini melaksanakan kegiatan pengelolaan Protokoler dan Perjalanan Kepala Daerah / Wakil dan Pejabat Daerah waktu dan kenyamanan para pejabat dalam melaksanakan perjalanan dinas maupun kegiatan-kegiatan lain dapat dilaksanakan dengan baik. Program ini juga melaksanakan kegiatan pagelaran kesenian dan kebudayaan Kalimantan Barat, penyediaan jasa penggunaan tanah bangunan gedung dan rumah, pengelolaan messs daerah, kegiatan peningkatan pelayanan Badan Penghubung & Anjungan Daerah Kalimantan Barat.

Dengan demikian **Sasaran Strategis** yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfokus pada tindakan operasional organisasi merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh.

Sedangkan **Kebijakan Program** sebagai alat untuk mewujudkan sasaran strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja. Kebijakan adalah arah tindakan yang diambil oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan target. Kebijakan tersebut digolongkan dalam dua kelompok yaitu :

- a. Kebijakan Internal yaitu kebijakan Organisasi Perangkat Daerah dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan.



- b. Kebijakan Eksternal adalah kebijakan yang diterbitkan Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi
- c. kegiatan masyarakat, kebijakan eksternal juga merupakan salah satu jenis kegiatan Organisasi Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan suatu program.

Pada dasarnya *Kebijakan* merupakan suatu ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar dapat tercapai, lancar dan terpadu dalam mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut.

Sedangkan *Program* adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mencapai sasaran dan tujuan serta alokasi anggaran atau kegiatan dalam rangka mendorong, memfasilitasi dan mengkoordinasi kegiatan tersebut.

Setiap Program harus secara eksplisit memiliki hasil (outcomes) yang akan dihasilkan pada akhir periode perencanaan. Penyusunan indikator hasil (outcomes) ini harus dilakukan secara cermat agar tidak terjadi penyimpangan dalam pencapaiannya.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan strategis atau dokumen yang dipersamakan dengannya yang telah ditetapkan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat dijabarkan dalam Rencana Kinerja untuk tahun yang bersangkutan. Rencana Kinerja dimaksudkan untuk menjabarkan sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan pada Tahun Anggaran 2023.

Dokumen Perjanjian Kinerja memuat informasi mengenai sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan beserta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu di dalam dokumen



tersebut juga memuat informasi mengenai keterkaitan kegiatan dengan sasaran dan keterkaitan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap Sub Bidang di lingkungan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat.

Pada dasarnya kinerja tugas umum pemerintahan dan pembangunan pada Tahun Anggaran tertentu bukanlah kinerja yang berdiri sendiri tapi terkait dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu akan sangat sulit dan hampir mustahil untuk mengukur atau memberikan penilaian terhadap kinerja Badan Penghubung pada satu tahun anggaran sampai pada tingkat atau indikator dampak, karena dampak dari suatu program atau kegiatan ada yang baru dapat dinilai dalam jangka waktu lebih dari satu tahun sesuai dengan tujuan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dari program itu.

Selain itu dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, maka kewenangan Pemerintah Provinsi menjadi sangat terbatas, sehingga tentunya berpengaruh juga terhadap kinerja Badan Penghubung. Dalam hal ini akan lebih tepat apabila indikator kinerja program ditetapkan berdasarkan indikator outcome. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Indikator kinerja kegiatan merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan pada akhir suatu periode tertentu.

Kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan akan dilaksanakan sesuai dengan indikator kinerja kegiatan yang meliputi indikator kinerja *inputs*, *outputs*, *outcomes*, *benefits* dan *impacts*.



TABEL 2

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

NO	SASARAN TRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Terlaksananya Pelayanan dan Koordinasi kelembagaan yang baik terhadap Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta	Persentase sistem pelayanan dan Koordinasi kelembagaan yang baik terhadap pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat	100%
2	Terlaksananya layanan penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta	Persentase Kegiatan Layanan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Penunjang urusan pemerintah Daerah Provinsi	Rp. 5.521.945.655,00	APBD
2.	Pelayanan Penghubung	Rp. 1.364.140.293,00	APBD
	JUMLAH / TOTAL	Rp. 6.886.085.948,00	

Perjanjian kinerja masing-masing pegawai terlampir dalam lembar belakang dari Laporan Kinerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023. Dokumen perjanjian kinerja tersebut adalah bagian tidak terpisahkan dari laporan kinerja ini.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta Tahun Anggaran 2023 yang disusun berdasarkan Outline Laporan Kinerja Tahunan SKPD Tahun 2023.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja pada dasarnya merupakan acuan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta. Pengukuran kinerja dilakukan sebagai hasil dari proses penilaian yang terencana dan sistematis berdasarkan kelompok indikator kinerja kegiatan berupa indikator input, output maupun outcome untuk mengukur kehematan, efisiensi, efektifitas, kualitas serta akuntabilitas pencapaian sasaran dan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) .

1. PENGUKURAN KINERJA TERCAKUP 2 (DUA) HAL, SEBAGAI BERIKUT:

- a. Tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.
- b. Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan.

2. HASIL PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah pula kinerjanya.

b. Semakin rendah capaian kinerja menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin tinggi capaian kinerja menunjukkan semakin tinggi kinerjanya.

Adapun penyimpulan pada tingkat sasaran yang memiliki indikator kinerja lebih dari satu menggunakan "Metode Rata-rata Tertimbang Data Kelompok". Dalam metode ini, capaian masing-masing indikator dikonversikan dalam skala pengukuran ordinal yaitu **sangat berhasil** (nilai tengah 92,5%), **berhasil** (nilai tengah 77,5%), **cukup berhasil** (nilai tengah 62,5%) dan **tidak berhasil** (nilai tengah 27,5%). Nilai akhir capaian (%) sasaran tersebut adalah rata-rata dari hasil perkalian jumlah indikator pada kategori yang sama dengan nilai tengah kategori tersebut.

Untuk pembelajaran pengukuran dan evaluasi atas kinerja beberapa kegiatan, ditetapkan indikator kinerja outcome yang lebih tinggi (ultimate outcomes) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Namun demikian, karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya sistem dan pengumpulan data serta indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya telah menggunakan indikator kinerja yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat disajikan.

Tugas - tugas umum pemerintahan (pelayanan publik) belum dapat ditetapkan indikator keberhasilannya, mengingat Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang menjadi acuan pembuatan indikator pada umumnya masih dalam proses penyusunan, sehingga capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih dititikberatkan pada sejauh mana program dan kegiatan yang dilaksanakan telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya. Indikator kinerja ditetapkan secara mandiri, yang meliputi indikator mikro, indikator strategis Pemerintah Daerah dan indikator makro.

Hasil pengukuran kinerja yang sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan



Penghubung Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran. Dan sebagian lagi berupa indikator hasil (outcomes), sedangkan indikator manfaat dan dampak sebagian baru terbatas pada identifikasi untuk melihat keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran, mengingat sistem pengukuran kinerja di lingkungan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat belum sepenuhnya terbangun. Adapun hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator kinerja sasaran yang meliputi indikator makro, indikator strategis dan indikator mikro. Penetapan indikator-indikator ini harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisir sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.

Hasil capaian baik kekurangan maupun kelebihan merupakan hasil kerja manajemen dalam mensinergikan berbagai sumber daya dan keterlibatan seluruh komponen yang ada dalam lingkungan organisasi, tidak terkecuali pengaruh kondisi dan situasi yang melingkupinya. Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capaian suatu indikator tidak semata-mata merupakan output dari suatu program atau sumber dana tetapi merupakan akumulasi, korelasi dan sinergi antara berbagai program dan berbagai pihak yang terlibat dalam proses pembangunan. Dengan demikian keberhasilan pembangunan tidak dapat diklaim sebagai suatu hasil dari sumber dana atau oleh suatu pihak saja.



Kinerja tugas umum pemerintahan dan pembangunan pada tahun anggaran tertentu bukanlah kinerja yang berdiri sendiri, tapi terkait dengan kerja bertahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu akan sangat sulit dan hampir mustahil untuk mengukur atau memberikan penilaian terhadap kinerja APBD satu tahun anggaran sampai pada tingkat atau indikator dampak dari suatu program atau kegiatan ada yang baru dapat dinilai dalam jangka waktu lebih dari satu tahun sesuai dengan tujuan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dari program itu.

Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian terdahulu, bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, maka kewenangan Pemerintah Provinsi menjadi sangat terbatas, sehingga dengan kewenangan yang terbatas tersebut tentu berpengaruh terhadap kinerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta. Dalam hal ini kami menilai akan lebih tepat manakala indikator kinerja program ditetapkan berdasarkan outcomes.

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat pencapaian kinerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta Tahun 2023 dapat disajikan berdasarkan outline laporan kinerja tahunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai berikut :



**1. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini;
(Core bisnis)**

**TABEL 1
TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	REALISASI	%
1.	Terlaksananya Pelayanan dan Koordinasi kelembagaan yang baik terhadap Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta	Persentase sistem pelayanan dan Koordinasi kelembagaan yang baik terhadap pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat	5.521.945.655,00	5.118.612.953,00	92,70
2.	Terlaksananya layanan penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta	Persentase Kegiatan Layanan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta	1.364.140.293,00	1.291.010.627,00	94,64

Sasaran Strategis 1 :

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Sasaran Strategis 1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAI AN
1.	Terlaksananya Pelayanan dan Koordinasi kelembagaan yang baik terhadap Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta	Persentase sistem pelayanan dan Koordinasi kelembagaan yang baik terhadap pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat	5.521.945.655,00	5.118.612.953,00	92,70

Penjelasan

Sasaran Strategis 1 :

Tertunjangnya Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta. Program / kegiatan ini menitik beratkan pada pemenuhan kebutuhan



administrasi perkantoran di lingkungan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta. Didalam Perjanjian Kinerja ini tiap program terdapat pelaksanaan kegiatan- kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 102.502.135,00 dengan capaian kinerja 53,52%
2. Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.679.176.344,00 dengan capaian kinerja 91,50 %.
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 32.000.000,00 dengan capaian kinerja 94,77 %.
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 28.572.600,00 dengan capaian kinerja 93,29 %.
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 336.986.998,00 dengan capaian kinerja 97,37 %.
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 113.538.100,00 dengan Capaian Kinerja 96,61%.
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 457.467.194,00 dengan capaian kinerja 95,11 %.
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 771.702.284,00 dengan caian kinerja 99,44 %.

Sasaran Strategis 2 :

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Sasaran Strategis 2

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Terlaksananya layanan penghubung Pemerintah	Persentase Kegiatan Kegiatan Layanan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi	1.364.140.293,00	1.291.010.627,00	94,64%



Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta	Kalimantan Barat di Jakarta			
---	-----------------------------	--	--	--

Penjelasan

Sasaran Strategis 2 :

Program/kegiatan diatas menjadi prioritas utama mengingat kegiatan fasilitasi perjalanan dinas pejabat, pagelaran kesenian dan kebudayaan, pembayaran PBB asrama mahasiswa, pengelolaan mess, merupakan core bisnis dari Badan Penghubung. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bidang Pelayanan, Sub Bidang Promosi Daerah, dan Subbag Tata Usaha dengan didukung oleh para staf yang mampu dalam pelaksanaan sehingga dapat menunjang pencapaian kinerja Badan Penghubung di Jakarta. Terlaksananya Pelayanan dan Koordinasi Kelembagaan yang baik terhadap Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab/Kota di Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta merupakan program yang mempunyai **Indikator Kinerja Utama (IKU)** Jumlah Fasilitasi Kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Pejabat Lainnya.

Dalam memfasilitasi kegiatan kedinasan Pejabat selama di Jakarta maupun daerah lainnya se-Jabodetabek yang dilaksanakan pada hari kerja ataupun hari-hari libur /hari-hari besar sesuai dengan kegiatan / acara pada saat itu. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga (HAL) dan Sub Bidang Pelayanan. Subbid ini didukung oleh para staf yang cekatan dan siap serta mempunyai kemampuan yang dapat diandalkan dalam melaksanakan tugas sehingga kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Badan Penghubung mampu mencapai realisasi tercapai 9 Kegiatan pencapaian kinerja sebesar 93,03%. Terlampir laporan kegiatan Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023.

REALIASASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN MASING-MASING URUSAN YANG MENJADI PRIORITAS/CORE BISNIS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALBAR TAHUN 2023



NO	URUSAN WAJIB	BELANJA TDK LANGSUNG (Rp)	BELANJA LANGSUNG			TOTAL BELANJA (Rp)	REALISASI (Rp)	%
			PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6	7 (3+4+5+6)	8	9 (8/7)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		3.650.140.450	1.783634.750	88.170.500	5.521.945.655	5.118.612.953	93%
2.	Program Pelayanan Penghubung		-	1.364.140.293	-	1.364.140.293	1.291.010.627	95%
			3.650.140.450	3.147.774.998	88.170.500	6.886.085.948	6.409.623.580	93,08%

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

TABEL 2

PERSENTASE CAPAIAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021, 2022, 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	2021	2022	2023
1.	Terlaksananya Pelayanan dan Koordinasi kelembagaan yang baik terhadap Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta	Persentase sistem pelayanan dan Koordinasi kelembagaan yang baik terhadap pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat	89,53 %	94,14 %	92,70 %
2.	Terlaksananya layanan penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta	Persentase Kegiatan Kegiatan Layanan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta	88,32%	94,56 %	94,64 %

Penjelasan :

Pada kurun waktu tiga tahun terakhir tampak bahwa program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi selalu tampak meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa terbukti adanya perbaikan kinerja pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat.



Semua leading sektor bekerja sebaik mungkin dalam pemenuhan kebutuhan kantor, baik dalam hal pemenuhan perencanaan Anggaran maupun evaluasi kinerja perangkat daerah maupun pemenuhan kegiatan administrasi lainnya seperti keuangan, administrasi barang milik negara dan pengadministrasi umum meningkat setiap tahunnya. Pengadaan barang dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah juga tampak mengalami peningkatan sejak tahun 2021, 2022 dan sekarang tahun 2023. Hal ini menunjukkan peningkatan kinerja Badan Penghubung yang semakin baik

Pelaksanaan pemenuhan layanan penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta sejak tahun 2020 tampak menurun capaian kinerjanya pada tahun 2021 namun meningkat kembali di tahun 2023 ini

Walaupun sempat mengalami penurunan capaian kinerja pada tahun 2021 namun Pelayanan dan Koordinasi Kelembagaan yang baik terhadap Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab/Kota di Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta meningkat kembali pada tahun 2022 dan Sekarang Tahun 2023.

Sempat menurunnya kegiatan pejabat dari daerah ke Jakarta berpengaruh pada capaian kinerja tahun 2021 yang tampak menurun. Efektisitas kegiatan pegawai yang terbagi antara *work from home* (WFH) dan *Work from Office* (WFO) serta pengaruh pandemi Covid 19 sudah mulai memudar seiring berjalannya waktu dan dengan tercapainya kesuksesan program vaksinasi di paruh kedua tahun 2022 menjadi faktor yang mendukung meningkatkan kesuksesan program yang menjadi **Indikator Kinerja Utama (IKU)** yaitu kesuksesan Fasilitasi Kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Pejabat Lainnya di Jakarta. Berikut ini tersaji table perbandingan realisasi kinerja tahun 2021-2022 dan target tahun 2023



Perbandingan realisasi Kinerja 2022-2023 dan Target Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI		Target 2024	Tingkat Kemajuan
			2022	2023		
1.	Terlaksananya Pelayanan dan Koordinasi kelembagaan yang baik terhadap Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta	Persentase sistem pelayanan dan Koordinasi kelembagaan yang baik terhadap pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat	94,14	92,70	100	98%
2.	Terlaksananya layanan penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta	Persentase Kegiatan Layanan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta	94,56	94,64	100	100%

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

TABEL 3

REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH PROGRAM YANG MENJADI CORE BISNIS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI			TARGET 2024
			2021	2022	2023	
1.	Terlaksananya Pelayanan dan Koordinasi kelembagaan yang baik terhadap Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta	Persentase sistem pelayanan dan Koordinasi kelembagaan yang baik terhadap pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat	4.509.429.467 (89,53%)	4.525.115.606 (94,14%)	5.521.945.655 (92,70%)	100 %
2.	Terlaksananya layanan penghubung	Persentase Kegiatan Layanan	1.199.053.000 (95,01 %)	1.367.465.971 (94,56%)	1.364.140.293 (94,64%)	100 %



Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta	Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta				
TOTAL		5.708.482.467	5.892.581.577	6.886.085.948	100 %

Dalam perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi tampak bahwa seluruh capaian realisasi program terlaksana dengan baik meningkat dari tahun ke tahun. membuktikan bahwa kinerja Badan Penghubung semakin baik seiring dengan berjalannya waktu.

Dengan dicapainya kinerja yang tercatat baik ini diharapkan pada tahun 2023 senada dengan target jangka menengah akan semakin meningkat. Keberhasilan ini tentunya sangat bergantung pada suasana kebersamaan dan perwujudan visi misi Badan Penghubung yang mendukung suksesnya pencapaian jangka menengah.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi :

Dalam mencapai capaian kinerja yang maksimal Badan Penghubung berusaha untuk mendapatkan yang terbaik dengan didukung SDM yang ada, secara garis besar untuk penyerapan anggaran bisa di capai dengan capaian target 92,70 % dengan total anggaran yang di alokasikan sebesar Rp 5.521.945.655,00 dengan realisasi anggaran Rp. 5.118.612.953,00

b. Program Pelayanan Penghubung :

Dalam melaksanakan Program Pelayanan Penghubung konsultasi dan koordinasi merupakan kunci yang sangat penting sehingga bisa mencapai kinerja yang maksimal. Adapun kendala



yang di hadapi adalah kurangnya SDM saat melaksanakan tugas di lapangan sehingga terkadang pencapaian kinerja yang maksimal sulit terlaksana. Dalam program ini penyerapan anggaran masih bisa di capai dengan capaian kinerja 94,64 % dengan total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 1.364.140.293,00 dengan realisasi anggaran Rp. 1.291.010.627,00

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Sasaran Strategis 1 :

Dalam hal pemenuhan kebutuhan administrasi kantor Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat tampak maksimal capaian kinerjanya. Pada kenyataannya terdapat efisiensi sebesar 92,70% dalam tahun ini. Hal ini menunjukkan bahwa unit kerja meningkat efisiensi penggunaan sumber dayanya.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	%		
1.	Terlaksananya Pelayanan dan Koordinasi kelembagaan yang baik terhadap Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta	Persentase sistem pelayanan dan Koordinasi kelembagaan yang baik terhadap pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat	5.521.945.655	5.118.612.953	92,70	100%	92,70%

Walaupun tampak efisiensi sumber daya sebesar 92,70% namun tugas - tugas umum pemerintahan (pelayanan publik) belum dapat ditetapkan indikator keberhasilannya, mengingat Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang menjadi acuan pembuatan indikator pada umumnya masih dalam proses penyusunan, sehingga capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih dititikberatkan pada sejauh mana program dan kegiatan yang dilaksanakan

telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya. Indikator kinerja ditetapkan secara mandiri, yang meliputi indikator mikro, indikator strategis Pemerintah Daerah dan indikator makro.

Sasaran Strategis 2 :

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran strategis ke 2 adalah terlaksananya Pelayanan penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta tampak peningkatan efisiensi sumber daya sebesar 5,46%. Hal ini menunjukkan bahwa Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Penghubung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.364.140.293,00 dengan capaian kinerja 94,64 % sehingga tingkat efisiensi anggaran adalah 94,64% sebagai berikut :

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	%		
2.	Terlaksananya layanan penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta	Persentase Kegiatan Kegiatan Layanan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta	1.364.140.293	1.291.010.627	94,64	100%	94,64 %

Pada sasaran strategis terlaksananya kegiatan layanan penghubung pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mencakup 3 kegiatan yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat
2. Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung.



Didalam Perjanjian Kinerja setiap program telah dilaksanakan efisiensi penggunaan sumber daya. Usaha untuk meningkatkan efisiensi di masing- masing program telah terlaksana dengan baik.

6. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Secara keseluruhan, upaya yang dilakukan Badan Penghubung Daerah Provinsi Kalimantan Barat melalui program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendorong pencapaian indikator sasaran strategis tahun 2023 sudah berjalan dengan baik. Adapun berbagai hambatan dan solusi yang dimiliki Badan Penghubung adalah sebagai berikut.

Hambatan pada sasaran strategis ini adalah :

- a. Belum optimalnya kompetensi ASN berdasarkan beban kerja yang ada
- b. Kurangnya penyediaan Operasional Pengelolaan Mess sehingga menyebabkan dari sisi kebersihan dan kenyamanan para tamu mess dan pejabat yang dilayani tidak terpenuhi dengan maksimal dan sesuai standar
- c. Kurang Optimalnya Pengelolaan Protokoler Badan Penghubung di Jakarta sehingga menyebabkan perjalanan dinas pejabat yang dilayani tidak terpenuhi dengan maksimal dan sesuai standar.
- d. Kurangnya SDM di bidang Protokoler untuk tenaga Lapangan di Bandara dalam rangka pelayanan protokoler perjalanan dinas terhadap Gubernur/Wakil dan para pejabat eksekutif maupun legislatif Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta.
- e. Kurangnya SDM di bidang tenaga resepsionis, dalam rangka pelayanan terhadap para tamu Mess.

Solusi atas Hambatan Tersebut :

- a. Menyiapkan Rencana anggaran untuk melaksanakan kegiatan koordinasi agar dapat menghadiri kegiatan – kegiatan sebagaimana surat undangan yang ditujukan kepada Badan Penghubung. Dan penyediaan fasilitas zoom meeting untuk mengikuti kegiatan rapat melalui daring.
- b. Menyapaikan kerluan tambahan anggaran pada dalam penyediaan Operasional Pengelolaan Mess



- c. Mengalokasikan anggaran Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung untuk Pengelolaan Protokoler dan Fasilitas Pimpinan dengan Benar Sehingga Mencapai Keberhasilan.
- d. Meminta Penambahan Tenaga SDM untuk Protokoler Lapangan
- e. Mengadakan Pelatihan untuk meningkatkan keterampilan/ keahlian SDM dibidang Protokoler untuk tenaga lapangan dalam rangka pelayanan terhadap para Pejabat Eksekutif maupun Legislatif Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja sebagai berikut :

Tabel 5

Realisasi Anggaran Tahun 2023

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Realisasi Target (%)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	5.521.945.655	5.118.612.953	403.332.702	92,70
2.	Program Pelayanan Penghubung	1.364.140.293	1.291.010.627	73.129.666	94,64

Dari tabel dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Realisasi Anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi :
 - a. Kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah memiliki 3 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 102.502.135,00 dengan capaian kinerja 53,52 %.
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat Daerah memiliki 3 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.679.176.344,00 dengan capaian kinerja 91,50 %.



- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah memiliki 1 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 32.000.000,00 dengan capaian kinerja 94,77 %.
 - d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah memiliki 3 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 28.572.600,00 dengan capaian kinerja 93,29 %.
 - e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah memiliki 7 Sub Kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 336.986.998,00 dengan capaian kinerja 97,37 %.
 - f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah memiliki 2 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 113.538.100,00 dengan Capaian Kinerja 96,61 %.
 - g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memiliki 4 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 457.467.194,00 dengan capaian kinerja 95,11%.
 - h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memiliki 6 Sub Kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 771.702.284,00 dengan capaian kinerja 99,44 %.
2. Program Pelayanan Penghubung dengan kegiatan antara lain :
- a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat alokasi anggaran sebesar Rp. 807.262.500,00 dengan capaian Kinerja 98,77%
 - b. Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya alokasi anggaran sebesar Rp. 55.000.000,00 dengan capaian kinerja 86,43 %
 - c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung alokasi anggaran sebesar Rp. 501.877.793,00 dengan capaian kinerja 88,89 %



TABEL 6

REALISASI ANGGARAN YANG TELAH TERSERAP UNTUK PROGRAM KEGIATAN CORE BISNIS BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN BARAT DI JAKARTA TAHUN 2023

NO	PROGRAM	ANGGARAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	5.521.945.655	100 %	5.118.612.953	92,70
	a. Kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	b. Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat Daerah				
	c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
	d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
	e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
2.	Program Pelayanan Penghubung	1.364.140.293	100 %	1.291.010.627	94,64
	a. Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Penghubung				
	TOTAL	6.886.085.948	100 %	6.409.623.580	93,08

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dari bulan Januari s.d. Desember 2023.

Dalam Tahun Anggaran 2023 ini, Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat telah melaksanakan 2 (Dua) program yang meliputi 8 (delapan) kegiatan untuk mencapai 1 sasaran strategis dalam rangka mencapai visi, misi yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut untuk membiayai program dan kegiatan tersebut, telah ditetapkan anggaran yang tertuang dalam APBD Tahun 2023 sebesar Rp. 6.886.085.948,00 terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung

Sasaran-Sasaran Yang Termasuk Dalam Kategori Sangat Berhasil Terdiri Dari :

1. Terpenuhinya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
3. Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
4. Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
5. Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah.
6. Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
7. Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



8. Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Terpenuhinya Pelaksanaan Pelayanan Penghubung

Keberhasilan pencapaian sasaran dipengaruhi oleh upaya dan kerja keras Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat. Namun demikian capaian tersebut di atas belumlah optimal, baik pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan maupun dalam pelayanan masyarakat yang disebabkan terbatasnya dukungan personil, anggaran/dana, sarana dan prasarana kerja. Akibatnya ada beberapa kegiatan yang telah disusun dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 tidak dapat dilaksanakan seperti yang direncanakan sehingga mempengaruhi tingkat pencapaian kinerja yang sesuai dengan target kinerja.

Untuk kedepannya sehubungan dengan hal tersebut Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan lagi pelayanan administrasi perkantoran terhadap kegiatan prioritas
2. Sarana dan prasarana untuk kebutuhan Badan Penghubung termasuk Anjungan Daerah Kalimantan Barat di TMII dan asset lain /asrama akan lebih diupayakan untuk mendapatkan anggaran yang lebih besar dari tahun sebelumnya
3. Keberhasilan kinerja Badan Penghubung akan lebih meningkat oleh karena itu diperlukan disiplin yang lebih tinggi kepada para pegawai dalam melaksanakan berbagai tugas dan kewajiban yang menjadi tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung Kalimantan Barat.



4. Bahwa Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dan jembatan penghubung birokrasi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lainnya se- Indonesia akan lebih mengupayakan peningkatan fasilitas, partisipasi, kemitraan, kapasitas, disiplin dan juga peningkatan sarana dan prasarana secara optimal.

Dengan dilaksanakan langkah-langkah tersebut diatas akhirnya dalam mencapai visi dan misi dirasa cukup meningkat dan sesuai dengan tujuan sehingga dapat diharapkan kedepan, tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat bisa menjadi salah satu ujung tombak serta andalan Pemerintah dan juga cermin kebudayaan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Jakarta, Februari 2024

KEPALA BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,


ABDUL GANI, SH
Pembina
NIP. 19720821 199703 1 006



LAMPIRAN :

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

SKPD : Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta
Tahun Anggaran : 2023

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Realisasi Target (%)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.521.945.655	5.118.612.953	403.332.702	92,70
a.	Kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	102.502.135,00	54.860.262,00	47.641.873,00	53,52
b.	Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat Daerah	3.679.176.344,00	3.366.413.530,00	312.762.814,00	91,50
c.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	32.000.000,00	30.325.608,00	1.674.392,00	94,77
d.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	28.572.600,00	26.656.621,00	1.915.979,00	93,29
e.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	336.986.998,00	328.139.100,00	8.847.898,00	97,37
f.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	113.538.100,00	109.691.993,00	3.846.107,00	96,61
9.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	457.467.194,00	435.116.022,00	22.351.172,00	95,11
h.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	771.702.284,00	767.409.817,00	4.292.467,00	99,44
2.	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	1.364.140.293	1.291.010.627	73.129.666	94,64



Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat

a.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	807.262.500,00	797.355.549,00	9.906.951,00	98,77
b.	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	55.000.000,00	47.536.365,00	7.463.635,00	86,43
c.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	501.877.793,00	446.118.713,00	55.759.080,00	88,89
Total		6.886.085.948,00	6.409.623.580,00	476.462.368,00	93,08

Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2023 :

Rp. 6.886.085.948,00

Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2023 :

Rp. 6.409.623.580,00

Jakarta, Februari 2024

KEPALA BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



ABDUL GANI, SH

Rembina

NIP. 19720821 199703 1 006